

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era reformasi dituntut adanya demokratisasi dan pembentukan partai politik baru juga berkembang. Menyikapi tuntutan-tuntutan tersebut, maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik memberikan peluang bagi seluruh warga negara Republik Indonesia untuk membentuk partai politik. Hal ini dipandang sejalan dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul.¹

Tumbuhnya partai politik baru, maka pada Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 1999 tampil 48 partai politik bersaing, pileg tahun 2004 terdapat 24 partai politik dan 2009 terdapat 34 partai politik. Jumlah partai politik peserta Pemilihan Umum (Pemilu) turun 50% dari pemilu sebelumnya. Tetapi pada pileg tahun 2009 naik lagi menjadi 38 partai politik peserta pemilu yang bersaing, pileg 2014 tampil 12 partai politik dan pada pemilu serentak tahun 2019 peserta pemilu sebanyak 20 partai politik, 16 diantaranya adalah partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh.²

Sistem multipartai memungkinkan jumlah partai politik mudah mengalami perubahan, dimana partai politik baru bisa saja muncul dari adanya tuntutan perubahan dalam masyarakat. Lemahnya sistem partai dan ideologi mungkin tidak

¹ A. Gau Kadir, "*Dinamika Partai Politik di Indonesia*" Sosiohumaniora Vol. 16 No. 2, 2014, hlm. 135.

² *Partai Politik Peserta Pemilu 2019*,
<https://infoPemilu.kpu.go.id/Pileg2019/verpol/ddkpartaipolitik>

tidak adanya perbedaan signifikan diantara partai yang ada berbeda hanyalah logo dan warna. Hal ini memungkinkan proses politik berjalan kurang efisien dan efektif.³

Partai Besar dan kuat akan tetap hidup sementara partai kecil dan lemah akan tersingkir dengan sendirinya. Terbukti pada pemilu 2004 dari puluhan partai politik yang ada, hanya beberapa partai politik berhasil memenuhi ambisinya untuk memenangi pertarungan perebutan kekuasaan, yaitu Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat adalah tujuh partai politik berhasil mendominasi peta politik nasional di badan legislatif.

Masa reformasi tumbuh suburmya partai politik coba dikontrol dengan serangkaian peraturan dan syarat yang ketat dalam sebuah Undang-Undang partai politik dan Pemilu. Sejarah menunjukkan bahwa pembatasan tujuannya adalah untuk mengeliminasi partai sesungguhnya tidak diinginkan kehadirannya, proses itu kemudian berkembang di Indonesia menjadi lebih luas lagi, sehingga *parlementary* menjadi ambang batas parlemen untuk mengikuti pemilu berikutnya bagi partai telah ikut pemilu, tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah partai politik.⁴

Hal ini didasarkan adanya keinginan untuk menciptakan sistem presidensial stabil dan efektif dengan meminimalisir kegaduhan pada tata kelola pemerintahan, dengan demikian fase baru tersebut memunculkan keharusan sebuah kompetisi antar partai politik untuk mampu terpilih dan menduduki kursi pada lembaga legislatif. Hal ini mendorong partai politik untuk menjadi lebih

³ *Ibid*, hlm. 135.

⁴ Achmad Zakaria, "Pembatasan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dalam Perspektif Demokrasinya". Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Vol. 2 No. 1, 2016, hlm. 2.

serius memperluas dukungannya dan untuk selalu memperbaiki organisasi partainya. Upaya ini penting, karena idealnya partai politik membutuhkan basis massa yang loyal dan organisasi partai baik untuk dapat memenangkan pemilu. Apabila partai politik dengan sungguh-sungguh menjalankan upaya tersebut, maka sistem kepartaian di Indonesia lambat laun akan menjadi terlembaga.⁵

Partai politik di era reformasi belum dapat menjadi institusi publik menunjukkan tanggungjawab terhadap pemilihnya, saat memasuki reformasi partai politik dihadapkan pada tuntutan masyarakat begitu besar, sementara partai politik belum siap dengan pelebagaan baik. Sejumlah faktor membuat tingkat pelebagaan partai belum berkembang dengan baik adalah partai-partai yang ada umumnya relatif baru sehingga infrastruktur partai belum terbangun dengan baik. Selain itu, partai kerap mengalami konflik mengurus tenaga dan waktu sehingga tidak ada waktu untuk membangun pelebagaan partai politik.

Elit-elit partai pun belum menjadikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai satu-satunya aturan dalam mengelola partai politik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pemilu 2019, telah menetapkan partai politik peserta pemilu yang berjumlah 11 partai.

Tabel. 1.1

Komposisi Anggota Partai Politik DPRD Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Periode 2014-2024

⁵ Aisah Putri Budiarti, "Pelebagaan Sistem Kepartaian di Bawah Sistem Demokrasi Indonesia (1998- sekarang)". *Jurnal Penelitian Politik*. Vol. 12 No. 1, 2015, hlm. 40.

Partai Politik	Periode	Jumlah Kursi
PPP	2014-2019	0
	2019-2024	0
PKS	2014-2019	0
	2019-2024	0
PKB	2014-2019	0
	2019-2024	0
Demokrat	2014-2019	2
	2019-2024	0
PBB	2014-2019	2
	2019-2024	1
PDI-P	2014-2019	3
	2019-2024	3
Golkar	2014-2019	2
	2019-2024	4
PAN	2014-2019	15
	2019-2024	17
Hanura	2014-2019	3
	2019-2024	1
Gerindra	2014-2019	1
	2019-2024	2
NasDem	2014-2019	2
	2019-2024	2
Jumlah Anggota	2014-2019	30
	2019-2024	30
Jumlah Partai	2014-2019	11
	2019-2024	11

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

Berdasarkan hasil diatas adalah PPP, PKS, PKB, Demokrat, PBB, PDI-P, Golkar, PAN, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinda), dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Partai politik berkontestasi

dalam sebuah pemilu tentunya menyiapkan strategi tersendiri untuk meraih kemenangan. Mempersiapkan strategi tepat serta penerapan berhasil tentu akan mendatangkan hasil yang berdampak positif. PAN jelas menyiapkan strategi dalam upaya memenangkan pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Strategi dipersiapkan PAN pada pemilu legislatif tahun 2019 berdampak positif terhadap kiprah partai dalam mempertahankan kursi serta meningkatkan jumlah kursi yang diperoleh.

Pemilu 2019 menggunakan aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai persyaratan partai politik dapat menjadi peserta pemilu, seperti telah lulus verifikasi di KPU dan telah terdaftar dimenkopolhukam memiliki kepengurusan dari level daerah sampai pusat, memiliki keanggotaan dan lain sebagainya. Sebagai peserta pemilu baru juga akan dihadapkan dengan skema aturan pemilu baru, yakni pemilihan calon legislatif dan pemilihan presiden digelar dalam waktu yang sama.

Pencalonan anggota badan-badan legislatif merupakan salah satu proses dan tahap penting dalam pemilu termasuk di Indonesia. Praktik pemilu, rakyat pemilih sebagai subyek dalam proses politik dan pihak yang diwakili oleh partai-partai di DPR tingkat nasional atau DPRD ditingkat lokal, berulang kali sering tidak merasa terwakili aspirasi dan kepentingannya oleh para anggota parlemen.

Sejarah PAN di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jambi merupakan Kabupaten hasil pecahan

Kabupaten Tanjung Jabung pada tahun 1999.⁶ Kehidupan politik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak awal memang telah dideterminasi oleh PAN, namun partai politik lain juga ikut berpartisipasi dalam kontestasi politik telah dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Seperti pemilu serentak pada April 2019 lalu ada 11 partai politik menjadi peserta pemilu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan ada 7 partai politik berhasil mendapat kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu PAN, Golkar, PDIP, Gerindra, Nasdem, Hanura, dan Partai Bulan Bintang (PBB). Dan PAN berhasil memperoleh 17 kursi dari total 30 kursi tersedia.

PAN merupakan partai besar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sejak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2006, PAN memperoleh suara terbanyak dan berhasil mengantarkan Abdullah Hich sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur periode 2006-2011. Sebelum itu, PAN memperoleh 13 kursi DPRD Kabupaten dari total 30 kursi pada pileg tahun 2004. Pada pilkada 2011, pilkada 2015, pileg 2009, pileg 2014 dan pemilu serentak 2019 PAN selalu berhasil antar kadernya duduk diposisi orang nomor satu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan selalu mampu memperoleh kursi DPRD terbanyak pada setiap pileg diadakan termasuk pada pemilu serentak tahun 2019.

Perjalanan PAN di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak terlepas dari figur Zulkifli Nurdin yang merupakan elit lokal berpengaruh di Provinsi Jambi. Zulkifli Nurdin merupakan anak dari pengusaha kaya Jambi, yaitu

⁶ *Sejarah Pembentukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur*, <https://tanjabtimkab.go.id>.

Nurdin Hamzah. Zulkifli Nurdin dilahirkan di Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 28 Maret 1948.⁷

Pada tahun 1998 saat reformasi, Zulkifli Nurdin bergabung dengan PAN dan menempati posisi strategis sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Provinsi Jambi. Kemudian tahun 1999 mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dan terpilih, sebelum pada akhirnya memilih langkah untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Jambi ditahun yang sama. Mencalonkan diri sebagai Gubernur Jambi pada tahun 1999 dan berhasil terpilih dan menjabat selama dua periode yaitu periode 1999-2005 dan 2005-2010.⁸

Selain itu, Zumi Zola Zulkifli yang merupakan anak Zulkifli Nurdin juga turut memengaruhi perjalanan PAN Tanjung Jabung Timur. Zumi Zola pernah menjabat sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur periode 2011-2016 dan menjabat Gubernur Jambi tahun 2016-2018 untuk periode 2016-2021. Dalam karir organisasi, Zumi Zola menjadi ketua DPW PAN Provinsi Jambi 2015-2020. Sebelumnya, ia pernah menjadi ketua DPD PAN Tanjung Jabung Timur dan ketua Barisan Muda Penegak Amanat Nasional 2010-2015. Namun pada tanggal 9 April 2018 Gubernur Jambi yaitu Zumi Zola resmi menjadi tahanan Komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam kasus gratifikasi sejumlah proyek di Jambi dan pada November 2018 Zulkifli Nurdin meninggal dunia.

Dua peristiwa tersebut masyarakat berasumsi bahwa Zulkifli Nurdin maka goyah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun nyatanya tidak memberikan

⁷ Dora. *Zulkifli Nurdin Anak Muara Sabak yang Sukses di Ibukota*.
<https://infojambi.com/zulkifli-nurdin-anak-muara-sabak-yang-sukses-di-ibukota/>.

⁸ Zulkifli Nurdin, Zumi Zola. *Politik Dinasti di Jambi*.
<https://kumparan.com/naikketek/zulkifli-nurdin-zumi-zola-dan-politik-dinasti-di-jambi>.

dampak negatif terhadap PAN di Tanjung Jabung Timur terbukti pada pemilu serentak tahun 2019 PAN tetap mampu menjaga eksistensinya dengan memperoleh kursi DPRD lebih dari 50% dari jumlah kursi yang tersedia. Kebesaran nama PAN di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak terlepas dari pengaruh keberadaan keluarga besar Zulkifli Nurdin, walaupun trah dari keluarga Zulkifli Nurdin telah menurun namun nyatanya tidak menurunkan eksistensi PAN di Kabupaten Tanjung Jabung Timur hingga saat ini.

PAN adalah partai politik dengan menjadikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Cita-cita tertinggi dari PAN yakni menegakkan keadilan dalam mengelola sumber daya untuk didistribusikan secara merata. PAN merupakan salah satu partai eksistensinya tidak pernah lepas dari kalangan masyarakat dilihat dari setiap pemilihan PAN selalu berhasil mengantarkan kadernya duduk diposisi orang nomor satu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan selalu mampu memperoleh kursi DPRD terbanyak pada setiap pileg.

TABEL 1.2

Komposisi Perperiode Jumlah Kursi Anggota DPRD

No	Kab/Kota	Partai Politik	Periode	Jumlah Kursi
1	Kab. Batang Hari	PAN	2009-2014	1
			2014-2019	6
			2019-2024	5
2	Kab. Bungo	PAN	2009-2014	4
			2014-2019	3
			2019-2024	4
3	Kab. Kerinci	PAN	2009-2014	3
			2014-2019	4

No	Kab/Kota	Partai Politik	Periode	Jumlah Kursi
			2019-2024	5
4	Kab. Merangin	PAN	2009-2014	3
			2014-2019	3
			2019-2024	3
5	Kab. Muaro Jambi	PAN	2009-2014	5
			2014-2019	5
			2019-2024	5
6	Kab. Sarolangun	PAN	2009-2014	1
			2014-2019	1
			2019-2024	3
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	PAN	2009-2014	4
			2014-2019	5
			2019-2024	5
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	PAN	1999-2004	2
			2004-2009	13
			2014-2019	12
			2019-2024	17
9	Kab. Tebo	PAN	2009-2014	3
			2014-2019	3
			2019-2024	3
10	Kota Jambi	PAN	2009-2014	4
			2014-2019	5
			2019-2024	4
11	Kota Sungai Penuh	PAN	2009-2014	3
			2014-2019	3
			2019-2024	3

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

Berdasarkan hasil diatas adalah PAN mayoritas atau sebagai pemenang menduduki kursi DPRD dengan jumlah kedudukan yang paling banyak PAN dari 30 kursi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur diperebutkan, PAN meraih 17

kursi atau 50 persen lebih. Artinya pemilu 2019 kali ini bertambah 2 kursi dari sebelumnya, dipilih melalui pemilu setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Tanjung Jabung Timur terdiri dari 1 Ketua dan 2 Wakil Ketua berasal dari partai politik dengan jumlah kursi terbanyak. Terpilih menjadi Ketua DPRD dari PAN dan Wakil Ketua 1 dari Golkar, Wakil Ketua 2 dari PDI-P. Anggota DPRD Tanjung Jabung Timur sedang menjabat saat ini adalah hasil pemilu 2019 dilantik pada 2 September 2019 oleh ketua pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Rais Torodji digedung DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pemilu yang dilangsungkan pada tanggal 19 Desember 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada pemerintahan Presiden Joko Widodo ada 7 partai yang memperoleh kursi legislatif. PAN merupakan partai dengan jumlah suara terbanyak yakni 69.353 suara atau 51,89 persen dengan perolehan 17 kursi. Golkar memperoleh 15.025 suara atau 11,24 persen sehingga mendapatkan 4 kursi. PDI-P dengan 12.837 suara atau 9,61 persen, mendapatkan 3 kursi. Gerindra dengan 6.361 suara atau 4,76 persen, mendapatkan 2 kursi. NasDem meraih 7.173 suara atau 5,37 persen, mendapatkan 2 kursi. Hanura dengan 2.385 atau 1,77 persen, mendapatkan 1 kursi. PBB meraih 4.510 suara atau 3,37 persen, mendapatkan 1 kursi.

Tabel 1.3

Data Perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2019

NO	Partai Politik	Daerah Pemilihan Tanjab Timur			Jumlah Kursi
		1	2	3	
1.	PAN	27.147	21.882	20.324	17

		(Suara)	(Suara)	(Suara)	
2.	Golkar	4.177 (suara)	7.500 (Suara)	3.348 (Suara)	4
3.	PDI-P	4.461 (Suara)	3.600 (Suara)	4.776 (Suara)	3
4.	Gerindra	3.069 (Suara)	2.273 (Suara)	1.019 (Suara)	2
5.	NasDem	2.999 (Suara)	2.701 (Suara)	1.473 (Suara)	2
6.	Hanura	305 (Suara)	147 (Suara)	1.913 (Suara)	1
7.	PBB	2001 (Suara)	341 (Suara)	2.168 (Suara)	1
Total Kursi DPRD					30

Sumber : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Keberhasilan yang diraih PAN pada pemilu legislatif tentu saja tidak lepas dari berbagai strategi yang dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, karena tanpa berbagai strategi tersebut tentu saja kemenangan akan sulit diperoleh. Keberhasilan PAN dapat dibuktikan dengan pencapaian partai yang memiliki wakil pada setiap dapil di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni, M. Aris, S.Kom, Reza Pahlevi, SH, Zilawati, Ernawati, Jamil Akbar, S.E, Firmansa Ayusda, dan H. Syamsu Alam dari dapil 1 Kecamatan Dendang, Kuala Jambi, Muara Sabak Barat, dan Muara Sabak Timur, selanjutnya Kaharuddin, S.H, Nugraha Setiawan, S.IP, Agus, Saihata, S.Pd, dan Musabakoh dari dapil 2 Kecamatan Berbak, Nipah Panjang, Rantau Rasau, dan Sadu, kemudian Mahrup, Ariandi, H. Kurniani, Harman, S.Pd,

dan Tri Astuti Handayani dari dapil 3 Kecamatan Geragai, Mendahara, dan Mendahara Ulu.

Tabel 1.4

Data Nama–Nama Anggota Dewan Fraksi Partai Amanat Nasional Tahun 2019

DAFIL	NAMA ANGGOTA DEWAN
<p>DAFIL 1 Kecamatan Dendang, Kuala Jambi, Muara Sabak Barat, dan Muara Sabak Timur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • M. Aris, S.Kom. • Reza Pahlevi, SH. • Zilawati • Ernawati • Jamil Akbar, S.E. • Firmansa Ayusda • H. Syamsu Alam
<p>DAFIL 2 Kecamatan Berbak, Nipah Panjang, Rantau Rasau, dan Sadu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kaharuddin, S.H. • Nugraha Setiawan, S.IP. • Agus • Saihata, S.Pd. • Musabakoh
<p>DAFIL 3 Kecamatan Geragai, Mendahara, dan Mendahara Ulu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mahrup • Ariandi • H. Kurniani • Harman, S.Pd. • Tri Astuti Handayani

Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah dari sekian banyak daerah di Indonesia yang dihuni oleh berbagai suku atau etnis, yakni penduduk asli dikenal dengan nama Melayu Timur serta para pendatang terdiri atas etnis Bugis, Palembang, Jawa, Minang, Kerinci, Batak, dan Banjar. Ada pula golongan penduduk pendatang keturunan asing seperti Arab, Cina dan India. Masing-masing etnis memiliki adat, tradisi dan budaya berbeda dengan keunikannya masing-masing, namun sejarah membuktikan bahwa konflik

antar etnis sangat jarang terjadi.⁹ Hal ini membuat PAN untuk berkembang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena sesuai dengan ideologi PAN yaitu Nasionalis-religius dengan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material, dan spiritual. PAN menjaga elektabilitasnya menjadi partai pemenang meraih suara dan kursi terbanyak pada pemilu legislatif DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019.

Penulis menggunakan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan sedang dibahas, sehingga penulis dapat melihat kelebihan dan kekurangan dari penelitian terdahulu kemudian membandingkan dengan permasalahan dilakukan sekarang. Berikut beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan mengenai pelebagaan partai politik, yaitu: Pertama, Hatta Abdi Muhammad “Universitas Airlangga”, dalam penelitiannya berjudul Pembangunan Pelebagaan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Sebagai Partai Politik Baru di Indonesia, tahun 2017.¹⁰ Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa menyebutkan Perindo mengusung Hary Tanoesoedibjo sebagai identitas partai, terus mencitrakan keduanya pada segmen-segmen tertentu. Dalam hal ini kepemilikan media MNC Group menjadi kekuatan bagi Perindo. Disisi lain kunjungan kerja Hary Tanoesoedibjo dengan media MNC Group pada tempat-tempat tertentu, seperti Universitas, ruang-ruang keagamaan dan segmen-segmen lainnya merupakan cara untuk membentuk nilai otonomi Hary Tanoesoedibjo dan

⁹ Haeran. (2020), (*Multikultural Masyarakat Tanjung Jabung Timur: Membangun Kebersamaan di Tengah Keberagaman Melalui Pelestarian Tradisi*). Jurnal Humaniora, Vol. (4) (1), (Juni) (2020)

¹⁰ Hatta Abdi Muhammad. *Pembangunan Pelebagaan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Sebagai Partai Politik Baru di Indonesia*, 2017.

Perindo mengalami kenaikan dalam rangka persiapan menghadapi pemilu mendatang.

Kedua, Penelitian dari Zakly Hanafi Ahmad (Jurusan Ilmu Pemerintahan, dan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau), Aryo Akbar (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau), dan Adlin (Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau). Penelitiannya berjudul *Review Pengaruh Lokal Strongman di Provinsi Jambi*.¹¹ Hasil penelitian menunjukkan Zulkifli Nurdin berhasil membangun citra diri yang dermawan, merakyat dan reformis, pada akhirnya dapat mencapai titik kejayaan dalam determinasinya di Provinsi Jambi, citra baik dan dominasi keluarga beserta kroninya mampu membuahkan hasil dari mulai perjalanan Zulkifli ke politik, menjadi ketua PAN hingga Gubernur Jambi dua periode, serta perannya mendeterminasi di PAN dari menjadikan adiknya Hazrin Nurdin sebagai ketua DPW PAN, lalu peranya menaikan elektabilitas istrinya Ratu Munawaroh hingga duduk di DPR RI dan juga peran Zulkifli dalam memenangkan anaknya Zumi Zola di Pemilihan Gubernur Jambi tahun 2015, hingga menjadikan adiknya Zumi Zola yaitu Zumi Laza menjadi ketua DPD PAN Kota Jambi tahun 2015.

Ketiga, Agus Triana (Program Studi Ilmu Politik Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi), dalam penelitiannya berjudul *Pelebagaan PAN Tanjung Jabung Timur di Era*

¹¹ Ahmad, Z., Akbar, A., & Adlin, A. (2020). *Pengaruh Local Strongman Di Provinsi Jambi (Studi Kasus Dominasi Zulkifli Nurdin Terhadap Partai Amanat Nasional)*. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 1(1), 51-63.

Reformasi.¹² Hasil penelitian menunjukkan dimensi kesisteman seperti mekanisme penetapan Calon Legislatif (Caleg) PAN dan penempatan kader PAN dalam struktur wilayah kerja, dimensi identitas nilai dengan melihat basis massa PAN berdasarkan pengaruh PAN di pemerintahan, dimensi derajat otonomi dalam internal PAN otonomi pengambilan keputusan masih dipengaruhi oleh aktor luar partai dan terakhir dimensi pengetahuan publik dalam keberadaan PAN telah tertanam pada pengetahuan masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah PAN menjadi pilihan masyarakat dan dapat menjaga eksistensinya di Tanjung Jabung Timur selama ini bukan dikarenakan pelembagaan jadi secara keseluruhan menunjukkan bahwa proses dilakukan PAN Tanjung Jabung Timur selama ini belum maksimal dengan baik. Namun karena praktik patronase dan klientelisme, sebagai partai memegang kekuasaan sehingga memiliki kekuatan untuk menekan ada dibawahnya sehingga memudahkan praktik patronase dan klientelisme dilakukan. Selain itu, perekrutan figur lokal yang mapan juga menjadi faktor langgengnya PAN karena mampu memiliki figur partai berpengaruh dan menjadi tokoh sentral di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ***“Determinasi Partai Amanat Nasional Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Periode 2019-2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur”***.

¹² Triana, A. (2020). *Pelembagaan Partai Amanat Nasional (PAN) Tanjung Jabung Timur di Era Reformasi* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis membuat rumusan masalah tentang:

1. Apakah determinasi ideologi islam konservatif mempengaruhi pemilih pada pemilu legislatif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
2. Bagaimana marketing politik dalam menonjolkan ketokohan pendiri PAN pada pemilihan anggota legislatif setiap periode di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui determinasi ideologi islam konservatif mempengaruhi pemilih pada pemilu legislatif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis marketing politik dalam menonjolkan ketokohan pendiri PAN dalam pemilihan anggota legislatif setiap periode di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti, akademisi dan peneliti lainnya. Manfaat penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian mengarah pada detrmnasi partai politik,

khususnya menyangkut Determinasi PAN dalam pemilihan anggota legislatif periode 2019-2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Secara Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak terkait dalam determinasi pemilihan anggota legislatif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode berikutnya, dan bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan sebagai bahan acuan bagi ingin melakukan penelitian pada permasalahan yang sama.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Determinasi

Determinasi adalah ketetapan hati dalam mencapai maksud atau tujuan. Determinasi politik menurut asal katanya terdiri dari dua kata yaitu, determinasi dan politik. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia determinasi bisa diartikan sebagai faktor yang menentukan, sedangkan politik adalah hal-hal berkenaan dengan tata negara, urusan mencakup siasat dalam pemerintahan negara, cara bertindak dan taktik. Namun tindakan politik seringkali sering juga ditafsirkan sebagai sebuah kebijaksanaan. Istilah kebijaksanaan dalam hal ini ditransfer dari bahasa Inggris "*Policy*" secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur urusanurusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum atau peraturan,

dengan tujuan umum mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat warga negara.¹³

1.5.2 Orang Kuat Lokal (*Local Strongman*)

Menurut Joel S. Migdal merujuk kemunculan *local strongman*, salah satu sumber-sumber kekuasaan diantaranya adalah dari kekayaan yang dimiliki oleh pemimpinnya sebagai tuan tanah atau orang kaya.¹⁴ Migdal mencoba menerangkan tentang orang kuat lokal berhasil melakukan kontrol sosial. Orang kuat lokal melakukan kontrol sosial dengan menyertakan beberapa komponen penting dinamakan strategi bertahan hidup penduduk setempat. Dengan kondisi seperti itu, orang kuat bukan saja memiliki legitimasi dan memperoleh banyak dukungan diantara penduduk lokal, tetapi juga hadir untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tuntutan para pemilih atas jasa diberikan. Para penulis di ilhami Migdal cenderung membingkai diskusi mereka dengan istilah personalisme, klientisme dan hubungan patron-klien. Pola ini kemudian juga terjadi karena orang kuat lokal ditempatkan sebagai patron memberi kebaikan personal bagi klien melarat dan para pengikut di daerah kekuasaan mereka.

Analisis Migdal, berdasarkan pada kondisi dan realitas politik seperti munculnya kelompok-kelompok atau institusi informal diluar negara yang mengurangi efektivitas dan kapabilitas negara. Beberapa negara

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 23

¹⁴ Joel S. Migdal. *State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another*. (Cambridge, UK: The Press Syndicate of the University of Cambridge).

dunia ketiga menunjukkan bahwa kelemahan-kelemahan dunia ketiga telah melahirkan orang-orang kuat ditingkat lokal.

Migdal menyebut orang kuat lokal dengan sebutan *local strongman*. Orang kuat lokal didefinisikan sebagai kekuatan informal yang berupa tuan tanah, saudagar, pengusaha kaya, kepala suku, panglima perang, bos petani kaya, pemimpin golongan, pemimpin sekte agama, tokoh adat dan lain sebagainya, berusaha menguasai kontrol atas masyarakat dalam cakupan wilayah tertentu lewat kerjasama jejaring mereka bangun. Keberhasilan *local strongman* atau orang kuat lokal dalam mencapai monopoli dan kontrol sosial mereka di masyarakat menurut Migdal didasari atas tiga faktor utama.

- a. Karena sifat masyarakat berbentuk jejaring, dimana klientilisme tumbuh subur dan berkembang. Sehingga kontrol sosial terfokus pada kekuatan-kekuatan yang ada, karena tidak mampu dimonopoli oleh negara.
- b. Karena *mindset* mendarah daging ada dalam diri orang kuat lokal di masyarakat, dan sudah menjadi simbol tersendiri diantara mereka yang mana orang kuat menjadi panutan di kehidupan masyarakat lokal.
- c. Kemampuan orang kuat lokal mengintervensi lembaga yang ada di daerah sehingga menjadikan alur lembaga pemerintahan disana berpihak kepada kepentingan mereka.¹⁵

Melalui proses demokratisasi dan desentralisasi, para *local strongmen* dan bos ekonomi semakin memperoleh kesempatan untuk menjabat kursi sentral dilembaga pemerintahan daerah dibandingkan masa-masa sebelumnya. Kalaupun mereka tidak memangku jabatan-jabatan penting tersebut, para orang kuat lokal ini selalu berupaya

¹⁵ Migdal, State in Society: *Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another*. 1–7.

untuk memastikan bahwa para politisi dan birokrat lokal bergantung pada bantuan dan dukungannya agar kebijakan resmi menguntungkan bisnis dan posisinya.¹⁶

Pengertian bos lokal dalam penelitian Holifah merujuk pada broker lokal yang menikmati posisi monopolistik atas cara kekerasan dan sumber ekonomi dalam wilayah kekuasaan mereka masing-masing, seperti posisi walikota/bupati menjalankan daerahnya layaknya kekuatan pribadi mereka sendiri, atau kalangan dewan dan gubernur membangun mesin politik dan kerajaan bisnis merentang diseluruh distrik atau provinsi. Bos lokal ini hadir dengan mekanisme pemilu kompetitif dan berkala serta diikuti partisipasi politik tinggi. Mereka menggunakan berbagai strategi dari pembelian suara, penangkapan hingga intimidasi dengan penggunaan kekerasan ataupun uang. *Bossisme* beroperasi dalam bayangan rezim otonomi daerah dicirikan oleh persekutuan birokrat, partai bos-bos, pengusaha, militer, dan preman. Untuk "*bossisme local*" menggunakan aparaturnegara untuk menggerakkan masyarakat agar mengikuti kehendaknya.¹⁷

Bossisme local ada disetiap tingkatan, ada bos yang menguasai wilayah pada (kabupaten/kota), ada bos menguasai provinsi dan ada bos menguasai pusat. Jejaring patron-klien para "*bossisme local*" tidak statis

¹⁶ Apriyani, Tia. *Kebijakan Desentralisasi Hanya Menjadi Arena Nyaman Bagi Elit Politik*. <https://suara.com>.

¹⁷ Holifah, N. *Kekuatan Local Strongman dalam Pilkada Sampang 2012*. No.66, hlm. 37–39.

dan permanen, melainkan dinamis dan sangat cair. Mereka bisa berpindah-pindah patron ditingkat pusat, pindah-pindah klien ditingkat lokal dan pindah-pindah afiliasi partai politik nasional. *Bosisme Local* melakukan transaksi suara pemilih dengan bantuan ekonomi (berbentuk uang tunai), sembako, bibit, irigasi, pelunasan Hutang dan alat tukar lainnya. Mereka sangat mengerti dengan memberikan bantuan kesehatan, memberikan bantuan pekerjaan, memberikan bantuan hukum, maka kemudian ketika hari H pemilihan umum, mereka mengubah bantuan-bantuan mereka berikan menjadi suara dan dukungan politik.

Berbagai strategi dilakukan *bossisme local* untuk mempertahankan dominasinya dalam bidang ekonomi dan politik, Strategi tersebut diantaranya:

- 1) Menempatkan keluarga dan kroni sebagai walikota/bupati, wakil dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah
- 2) Mengatur penempatan posisi gudang pejabat daerah
- 3) Mengatur alur dan pilihan proyek pembangunan pemerintah
- 4) Mengatur pembentukan peraturan daerah
- 5) Mengatur keringan pajak
- 6) Mengatur pinjaman dari Bank Pembangunan Daerah
- 7) Memberikan konsesi dan kontrak pertambangan, kehutanan dan perkebunan
- 8) Intimidasi dari kekerasan politik

- 9) Menerapkan kebijakan diskriminatif untuk mengatasi konflik tanah dan melemahkan serikat buruh

Fenomenal orang kuat setempat terlihat jelas di Provinsi Jambi yang mana keluarganya Zulkifli Nurdin beserta PAN dibesarkannya disana merupakan cerminan nyata kiprah orang kuat lokal di Provinsi Jambi. Zulkifli Nurdin sebelum jadi Gubernur Jambi, memang sudah terkenal sedari kecil. Ia anak Nurdin Hamzah, seorang pengusaha legendaris tidak hanya punya jaringan sangat luas. Namun, juga dihormati karena sikapnya murah. Dimasa jayanya, ia kerap kali memberikan santunan kepada mereka tidak mampu. Adapun, citra Nurdin sendiri menurun dengan baik pada anaknya Zulkifli. Di Jambi, ia turut serta dalam beberapa organisasi profesi semaca Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Provinsi Jambi dan Gapensi (Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia) dan ia memiliki posisi strategis saat ini itu, ditengah kesibukannya sebagai pengusaha, ia masih rajin bersedekah dan datang kekampung-kampung bertemu dengan masyarakat. Serta, ia juga sosok religius, tidak jarang muncul diacara keagamaan. Kombinasi maut inilah menjadikan jalannya mulus ketika memutuskan untuk terjun ke dunia politik pada tahun 1996, dari memasuki partai Golkar hingga pindah ke PAN ketika Reformasi dan langsung menjadi Ketua Dewan.

Pimpinan Daerah pertama nantinya ikut memperbesar polarisasi partai ini disetiap daerah di Provinsi Jambi. Berlatar uraian tersebut diatas, fokus permasalahan dalam studi ini adalah bagaimana peran Zulkifli

Nurdin dalam membuat polarisasi PAN di Provinsi Jambi hingga mempertahankan citranya sebagai orang kuat lokal. Dengan demikian maka tujuan penelitian ini adalah untuk eksplorasi dan mendalami bagaimana Peran Zulkifli Nurdin dalam membuat polarisasi PAN di Provinsi Jambi hingga mempertahankan citranya sebagai orang kuat lokal.

1.5.3 Penerapan Klientelisme dengan Marketing Politik

a. Klientelisme

Klientelisme bukanlah produk baru dalam sistem demokrasi elektoral dan pemilu menjadi salah satu momentum terbentuknya pola hubungan klientelisme. Sehingga konsep klientelisme dapat digunakan untuk menjelaskan definisi politik “*who gets what*” dalam masyarakat. Mengambil sumber dari jurnal, Barendschot mendefinisikan klientelisme sebagai dana kampanye dan keuntungan dari negara yang didistribusikan berdasarkan hubungannya terhadap dukungan electoral.¹⁸ Dari konsep klientelisme dikemukakan oleh Barendschot menggambarkan bahwa transaksi terjadi hanya satu arah karena masih keberatkan pada distribusi.

Sedangkan James Scott mendefinisikan klientelisme sebagai mekanisme persahabatan dimana individu dengan status sosial ekonomi yang tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya dengan memberikan perlindungan atau keuntungan atau keduanya kepada orang lebih rendah statusnya (klien) sebagai bagian dari patron memberikan dukungan dan jasa kepada patron.¹⁹

¹⁸ Muhammad Nur Ramadhan dan Jimmy Daniel Berlianto Oley, “*Klientelisme sebagai Perilaku Koruptif dan Demokrasi Banal*”. Jurnal Anti Korupsi Integritas, vol.5, no.1, hlm. 173.

¹⁹ Ainur Rofeq dan Rahmat Nuryono. “*Pengaruh Klientelisme terhadap Perilaku Pemilih Masyarakat Kecamatan Sukatani Pada Pilkada Kabupaten Bekasi 2012*”.

Definisi ini menjelaskan bahwa pola relasi klientelisme terjadi secara timbal balik atau dua arah dengan mempertukarkan sumber daya masing-masing antara dua pihak yang memiliki status sosial tidak setara. Jika patrimonialisme merujuk pada sistem pemerintahan berdasarkan kekeluargaan serta hubungan patron-klien, maka klientelisme merujuk pada ikatan-ikatan personal antara patron dan kliennya. Ikatan ini lebih didasarkan pada pengambilan keuntungan materi antara dua belah pihak.²⁰

Fenomena hubungan patron-klien merupakan hubungan yang penuh emosional pribadi antara orang mengabdikan dan memperabdikan. Pola hubungan dalam konteks ini bersifat individual antara dua individu yaitu si patron dan si klien, terjadi interaksi bersifat resiprokal atau timbal balik dengan mempertukarkan sumber daya dimiliki oleh setiap pihak. Si patron memiliki sumber daya berupa kekuasaan, kedudukan atau jabatan, perlindungan, perhatian dan tidak jarang pula sumber daya berupa materiil (harta kekayaan, tanah garapan dan uang). Sementara itu klien memiliki sumber daya berupa tenaga, dukungan dan loyalitas.²¹

Pola hubungan tersebut akan tetap terpelihara selama masing-masing pihak tetap memiliki sumber daya tersebut. Jika tidak demikian, setiap pihak akan mencari orang lain, apakah mereka itu sebagai patron ataukah sebagai klien. Hal yang perlu diperhatikan pula adalah bahwa

²⁰ *Ibid.*

²¹ Kausar AS, *Sistem Birokrasi Pemerintahan di Daerah Dalam Bayang-bayang Budaya Patron-Klien*. Cet. 1, (Bandung: PT. Alumni, 2009), hlm. 7-8.

paling banyak menikmati hasil dari hubungan ini adalah patron, sebab dialah memiliki sumber daya lebih besar dan lebih kuat ketimbang klien.²²

b. Marketing Politik

Seiring dengan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi, semakin terintegrasinya masyarakat global dan tekanan untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, institusi politik pun membutuhkan pendekatan alternatif untuk membangun hubungan dengan konstituen dan masyarakat luas. Dalam konteks inilah marketing sebagai suatu disiplin ilmu yang berkembang dalam dunia bisnis diasumsikan berguna bagi institusi politik.

Marketing politik, yang ditekankan adalah penggunaan pendekatan dan penggunaan metode marketing untuk membantu politisi dan partai politik agar lebih efisien dan efektif dalam membangun hubungan dua arah dengan konstituen dan masyarakat. Menurut Butler dan Collins, marketing politik adalah konsep permanen harus dilakukan terus-menerus oleh sebuah partai politik atau kontestan dalam membangun kepercayaan dan image publik.²³ Maka marketing politik merupakan serangkaian kegiatan terencana dan dilakukan melalui hubungan jangka panjang dan jangka pendek, untuk menyebarkan makna politik kepada rakyat atau pemilih dan tidak hanya dilakukan pada masa kampanye. Menurut Firmanzah bahwa penggunaan metode marketing politik tidak terlepas dari tingginya

²² *Ibid*, hlm. 8.

²³ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.), 2007: hlm. 156

persaingan (competition) dalam dunia politik sehingga dibutuhkan sebuah strategi untuk dapat memenangkan persaingan tersebut. Marketing politik adalah metode dan merupakan aplikasi dari marketing dalam konteks dunia politik, digunakan sebagai seperangkat instrumen oleh kontestan (individu maupun kelompok) dalam memasarkan inisiatif politik, gagasan politik, isu politik, ideologi, karakteristik pemimpin, dan program kerja kepada masyarakat.

Menurut Firmanzah sebuah proses pemasaran harus digerakkan oleh empat elemen utama, yaitu, 4P: produk (*product*), promosi (*promotion*), harga (*price*) dan tempat (*place*).

1) Produk (*Product*)

Produk dalam pemasaran yang ditawarkan institusi politik merupakan sesuatu kompleks, dimana pemilih akan menikmatinya setelah seorang partai atau calon terpilih. Arti penting sebuah produk politik tidak hanya ditentukan oleh karakteristik produk itu sendiri. Partai politik menjual produk tidak nyata, sangat terkait dengan sistem nilai, didalamnya melekat janji dan harapan akan masa depan, didalamnya terdapat visi bersifat atraktif, kepuasan dijanjikan tidaklah segera tercapai, tetapi hasilnya lebih bisa dinikmati dalam jangka panjang, tidak pasti dan dapat ditafsirkan macam-macam.

2) Promosi (*Promotion*)

Promosi sebagian besar literatur dalam marketing politik membahas cara sebuah institusi politik dalam melakukan promosi ide, platform partai dan ideologi selama kampanye pemilu. Tidak jarang institusi politik bekerja sama dengan sebuah agen iklan dalam membangun slogan, jargon, dan citra yang akan ditampilkan.

3) Harga (*Price*)

Harga adalah suatu institusi politik berusaha untuk meminimalisasi harga produk politik (minimalisasi resiko) mereka dan meningkatkan (maksimalisasi) harga politik lawan. Menjadikan harga politik lawan semakin mahal (semakin beresiko) merupakan strategi yang bisa digunakan partai politik atau calon presiden guna memperoleh dukungan publik, sebab pemilih akan memilih partai atau kontestan memiliki resiko atau harga relatif paling kecil.

Harga harus dibayar adalah kepercayaan dan keyakinan akan partai atau kontestan akan didukung.

4) Tempat (*Place*)

Tempat atau penempatan yang berkaitan erat dengan cara hadir atau distribusi sebuah institusi politik dan kemampuannya dalam berkomunikasi dengan para pemilih atau calon pemilih. Kampanye politik memang harus bisa menyentuh segenap lapisan masyarakat. Hal ini bisa dicapai dengan melakukan segmentasi publik. Sebuah institusi politik harus bisa mengidentifikasi dan memetakan struktur serta karakteristik masyarakat. Pemetaan ini bisa dilakukan secara geografis dengan melihat konsentrasi penduduk disuatu wilayah. Pemetaan juga bisa dilakukan secara demografis, dimana pemetaan dikelompokan berdasarkan tingkat pendidikan, pekerjaan, usia, kelas sosial, pemahaman akan dunia politik, kepercayaan agama, dan etnis. Pemetaan juga perlu dilakukan berdasarkan keberpihakan pemilih, misalnya saja berapa pendukung tradisional, berapa pendukung partai atau kandidat lain, berapa jumlah massa mengambang dan mungkin juga berapa persentase golput.²⁴

Dapat dikatakan empat elemen utama marketing politik menurut Firmanzah adalah, pertama, yang dimaksudkan produk disini adalah kemasan barang diproduksi oleh suatu unit usaha ingin dipasarkan guna memenuhi kebutuhan pembeli. Jika konsep ini dikaitkan dengan politik, maka produk mau dipasarkan bisa diterima oleh masyarakat adalah partai politik itu sendiri sebagai salah bentuk produk sosial. Selain partai politik, maka produk bisa juga dalam bentuk tanda gambar (logo), cita-cita (visi), program dan para caleg diajukan oleh partai politik. Misalnya pada penelitian ini sebuah produk disini adalah ketokohan seorang caleg ingin memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat pada masing-masing dapilnya.

²⁴ *Ibid.* hlm. 200 -207.

Kedua, promosi atau kampanye memegang peranan penting bukan saja dalam memasarkan partai politik beserta program dan visinya, tetapi juga dalam memasarkan caleg yang akan diusulkan partai. Ketiga, harga sebuah partai besar lebih sulit dimasuki oleh para calon ingin maju sebagai kontestan, dibanding partai-partai kecil digolongkan sebagai partai kecil. Partai-partai kecil lebih mudah dimasuki sebagai kendaraan politik untuk maju menjadi calon (bahkan sering kali mencari calon), meski peluang untuk menang relatif tipis karena pengaruhnya di masyarakat tidak sebesar PAN di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

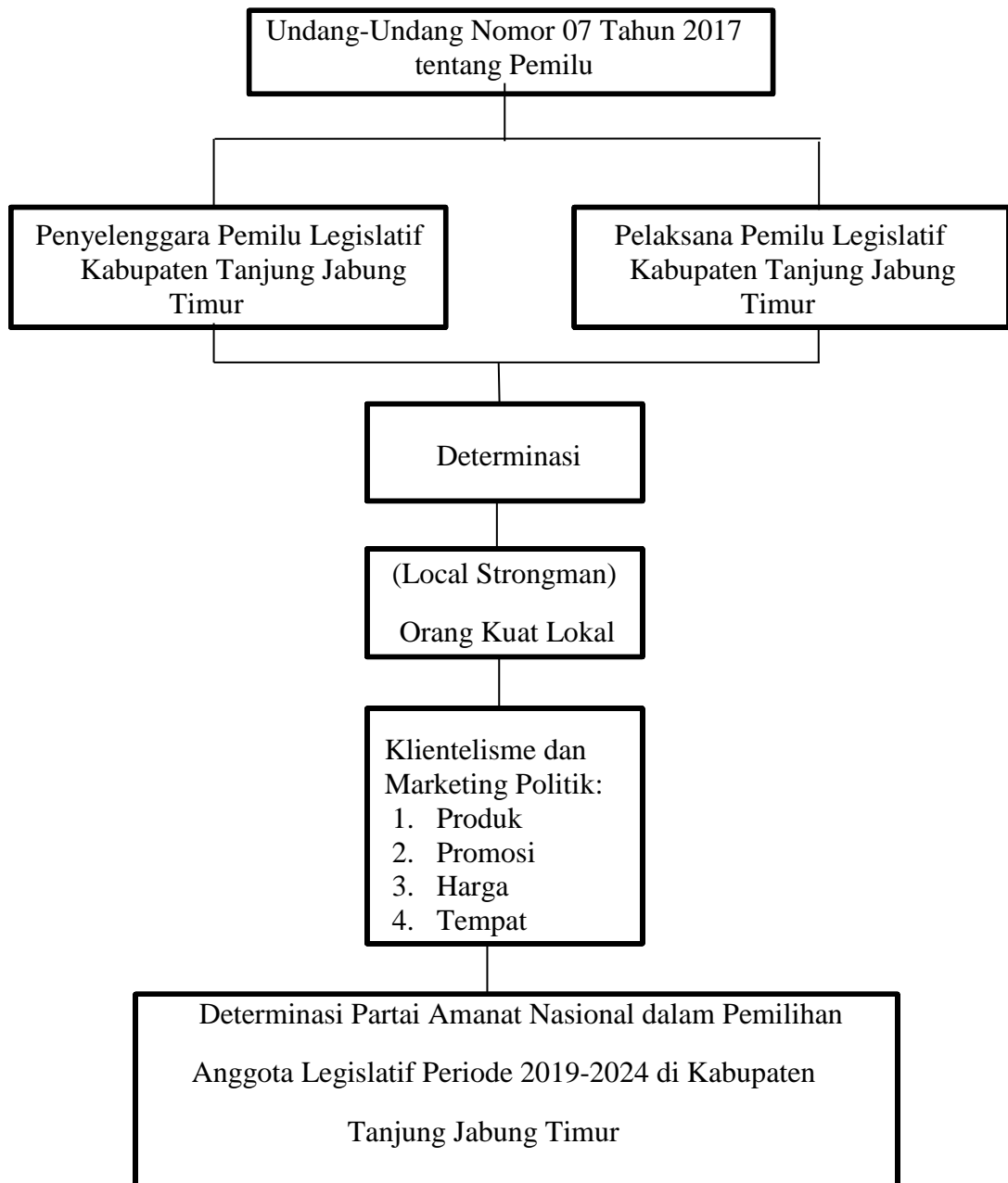
Keempat, dalam konteks komunikasi politik, tempat sering diasosiasikan dengan istilah ruang publik (*public sphere*) misalnya media masa yang dapat digunakan untuk memasarkan partai beserta cita-cita dan programnya. Ruang publik seperti internet, ruang reklame dipersimpangan jalan dapat dimanfaatkan untuk memasang tanda gambar guna menarik perhatian masyarakat.

Menggunakan 4P marketing dalam dunia politik menjadikan marketing politik tidak hanya sebatas masalah iklan dan komunikasi. Lebih dari itu, marketing politik adalah pendekatan komprehensif dalam hal yang menyangkut cara sebuah institusi politik ketika memformulasikan produk politik, menyusun program publikasi kampanye dan komunikasi politik, strategi segmentasi untuk memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat sampai perhitungan harga sebuah produk politik.

1.6 Kerangka Pikir

Gambar 2.1

Kerangka Pikir



1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif (*qualitative methods*) yaitu metode penelitian mengembangkan pertanyaan dasar tentang apa dan bagaimana kejadian itu terjadi, siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut, kapan terjadinya, dan dimana tempat kejadiannya.²⁵

Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses atau langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep beragam, karakteristik suatu barang atau jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya dan lain sebagainya.²⁶

Penelitian ini digunakan jenis deskriptif yaitu berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikan, juga bersifat komperatif dan korelatif, penelitian deskriptif banyak membantu terutama bersifat longitudinal, genetik dan klinis, survei biasanya termasuk dalam penelitian ini.²⁷

1.7.2 Lokasi /Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

²⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 7, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 23

²⁶ *Ibid*, hlm. 23.

²⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, cet. 15, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 44.

Alasan peneliti ingin meneliti Determinasi PAN dalam pemilihan anggota legislatif periode 2019-2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, karena PAN merupakan partai mayoritas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan ingin mengetahui determinasi apa yang digunakan oleh anggota legislatif PAN sehingga dapat terpilih menjadi anggota begitu banyak bertambah suara duduk menjadi anggota legislatif di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1.7.3 Fokus Penelitian

Penentuan fokus didasarkan pada tingkat kebaruan informasi akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Fokus penelitian yang diperoleh setelah melakukan penjelajahan umum, peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh masih pada tahap permukaan terhadap situasi sosial. Untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian mengenai Dominasi PAN dalam Pemilihan Anggota Legislatif Periode 2019-2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1.7.4 Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Utama (Primer)

Sumber data dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa diinginkan dalam penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer yaitu anggota legislatif PAN di Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2019-2024.

b. Sumber Data Tambahan (Sekunder)

Sumber data yang mencakup dalam segala bentuk dokumen tertulis, maupun foto. Dalam penelitian dokumentasi dan foto merupakan sumber data sekunder.²⁸

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Informan adalah orang yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, tambahan diperoleh dari informan lainnya, ditentukan teknik *purposive sampling* teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan.²⁹ Misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian menjelajahi objek/situasi sosial diteliti. Berdasarkan teknik penentuan informan tersebut, maka menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1.5

Informan

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Mahrup, S.E	Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Anggota Legislatif PAN
2.	Jamil Akbar, S.E	Ketua Fraksi PAN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Anggota Legislatif PAN
3.	Ariandi	Wakil Ketua Fraksi PAN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Anggota Legislatif PAN

²⁸ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 69-70.

²⁹ Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R dan D*. Bandung: Alfabeta 2017.

4.	Firmansa Ayusda, S. Pd.I	Sekretaris Fraksi PAN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Anggota Legislatif PAN
5.	Nugraha Setiawan, S.IP	Sekretaris DPD PAN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Anggota Legislatif PAN
6.	M. Juber	Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tanjung JABUNG Timur	Anggota Legislatif Golkar
7.	Roni, S.E	Sekretaris Bagian POK DPD PAN dan Ketokohan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Sumber Informasi
8.	Shinta Maharani, S.E	Ketua Barisan Muda (BM)	Sumber Informasi
9.	Hatta Abdi Muhammad, S.IP., M.IP.	Pengamat Politik Provinsi Jambi	Cendekiawan atau Intelektual

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber sekunder merupakan sumber tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.³⁰

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang

³⁰ *Ibid.*, hlm. 194.

akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis atau alternatif jawabannya pun telah disiapkan.³¹

Proses wawancara yang dilakukan peneliti adalah dengan membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan informan penelitian mengenai waktu untuk dapat melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada informan.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah pengumpulan dokumen catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tertulis berhubungan dengan penelitian.³²

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³³

Metode interaktif dalam analisis data ditunjukkan melalui hal-hal berikut.³⁴

a. Reduksi

Data dapat diartikan sebagai suatu proses pemikiran sensitif memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Reduksi data juga dapat diartikan sebagai suatu proses pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan dalam hal ini dapat dilakukan adalah pengkodean, menajamkan,

³¹ *Ibid.*, hlm.231.

³² *Ibid.*, hlm.231.

³³ *Ibid.*, hlm.244.

³⁴ *Ibid.*, hlm.244.

menggolongkan, mengarahkan, membuang tidak perlu dan mengorganisasi data.

b. Penyajian Data

Penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dengan melihat penyajian-penyajian peneliti dan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan harus dilakukan. Kecenderungan kognitifnya akan menyederhanakan informasi kompleks kedalam bentuk disederhanakan dan diseleksi atau konfigurasi mudah dipahami, polanya berupa matrik, jaringan dan bagan.

1.7.8 Keabsahan Data/Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan menggunakan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.³⁵

³⁵ *Ibid.*, hlm. 241.